Peran Partai Politik pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2024 di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Firmansyah Efendi*[1], Udin Hamim[2], Ramli Mahmud[3]
Program Studi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia[1,2,3]
*[1]e-mail: firmansyahefendy05@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partai politik dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten tahun 2024 di Kecamatan Bolaang Uki dengan menitikberatkan pada aspek *political recruitment*, *political socialization*, dan komunikasi politik, serta faktor politik yang mendukung seperti jaringan sosial, struktur kepengurusan, dan kapasitas mobilisasi pemilih. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan perspektif fenomenologi untuk memahami pengalaman serta interaksi aktor politik secara mendalam. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik memiliki peran strategis dalam menentukan hasil pemilihan melalui proses rekrutmen yang selektif, komunikasi politik yang intensif, serta penguatan jaringan sosial hingga tingkat akar rumput. Kapasitas mobilisasi pemilih yang didukung oleh tokoh lokal, kader, dan strategi kampanye yang terintegrasi juga berkontribusi signifikan terhadap perolehan suara. Namun demikian, fungsi *political socialization* masih cenderung bersifat temporer dan berorientasi pada momentum pemilu sehingga belum optimal sebagai sarana pendidikan politik berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan partai, peningkatan kualitas sosialisasi politik, serta optimalisasi komunikasi politik diperlukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Kata kunci : Komunikasi Politik; Mobilisasi Politik; Partai Politik; Rekrutmen Politik; Sosialisasi Politik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of political parties in the 2024 Regency DPRD election in Bolaang Uki District, focusing on political recruitment, political socialization, and political communication, as well as supporting political factors such as social networks, organizational structure, and voter mobilization capacity. The research employs a qualitative approach with a case study design and a phenomenological perspective to explore the experiences and interactions of political actors in depth. Data were collected through observation, in depth interviews, documentation, and triangulation, and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings reveal that political parties play a strategic role in shaping electoral outcomes through selective recruitment processes, intensive political communication, and the strengthening of grassroots social networks. Voter mobilization capacity supported by local figures, party cadres, and integrated campaign strategies also significantly contributes to electoral success. However, the function of political socialization remains largely temporary and oriented toward electoral momentum, limiting its effectiveness as a continuous political education process. This study concludes that strengthening party institutional capacity, improving political socialization, and enhancing substantive political communication are essential to improve the quality of local democracy.

Keywords **:** *Communication Politics; Political Mobilization; Political Parties; Political Recruitment; Political Socialization.*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus sarana bagi warga negara untuk menyalurkan hak-hak demokratisnya. Dalam kerangka negara demokrasi, pemilu tidak hanya dimaknai sebagai prosedur politik, tetapi juga sebagai manifestasi dari hak asasi manusia yang harus dijamin pelaksanaannya secara konstitusional. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu harus

dilaksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar prinsip kedaulatan rakyat tetap terjaga. Dalam konteks ini, seluruh proses pemilihan seyogianya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, sehingga keputusan politik yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat (Hasibuan, 2023). Sejalan dengan itu, demokrasi secara konseptual dipahami sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan, sebagaimana tercermin dari asal kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan (Lutpiani, 2021). Demokrasi juga menuntut adanya jaminan terhadap hak-hak individu serta keberadaan konstitusi sebagai dasar hukum dalam kehidupan bernegara (Susanto, 2013). Dalam perkembangan kontemporer, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan kebebasan politik, tetapi juga harus berjalan selaras dengan prinsip supremasi hukum dalam konsep *democratische rechtsstaat*, sehingga mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan (Aba et al., 2023).

Dalam praktiknya, pemilu menjadi mekanisme penting untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana pergantian kekuasaan secara damai, tetapi juga sebagai alat evaluasi terhadap kinerja pemerintah serta indikator tingkat demokrasi suatu negara (Labolo & Ilham, 2015; Rahmat et al., 2021; Widjiastuti et al., 2016). Namun demikian, pelaksanaan pemilu juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas rekayasa elektoral yang tidak selalu menghasilkan dampak sesuai harapan serta rendahnya kedewasaan politik masyarakat yang dapat memicu penyimpangan dalam praktik demokrasi (Al-Khansa & Dewi, 2021; Siregar et al., 1998; Wahdini, 2024). Oleh karena itu, keberhasilan pemilu sangat ditentukan oleh integritas penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang dituntut untuk bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab guna menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis dan berkualitas.

Di sisi lain, partai politik memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem demokrasi karena berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Kemunculan partai politik pada awalnya didorong oleh kebutuhan untuk melibatkan rakyat dalam proses politik, sehingga partai menjadi saluran aspirasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan negara (Duverger, 1954). Dalam konteks Indonesia, peran partai politik semakin diperkuat melalui berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur penyelenggaraan pemilu secara komprehensif, termasuk penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu guna menciptakan proses yang tertib dan demokratis (Saleh, 2008). Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai politik memiliki fungsi penting dalam pendidikan politik, rekrutmen kepemimpinan, penyaluran aspirasi masyarakat, serta peningkatan partisipasi politik warga negara. Dengan demikian, partai politik tidak hanya berperan sebagai peserta pemilu, tetapi juga sebagai aktor utama dalam membangun budaya politik yang demokratis dan berintegritas.

Meskipun demikian, dalam praktiknya partai politik di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti lemahnya transparansi dalam proses rekrutmen calon legislatif, rendahnya kapasitas mobilisasi pemilih, serta kualitas kader yang belum sepenuhnya memenuhi standar integritas dan kapasitas yang diharapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen, sosialisasi, dan komunikasi politik belum berjalan secara optimal. Padahal, ketiga fungsi tersebut merupakan faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta kualitas pemilu. Selain itu, faktor politik seperti kekuatan jaringan partai, dukungan elit, kualitas calon, dan strategi komunikasi politik juga menjadi penentu keberhasilan partai dalam kontestasi pemilu (Aminuddin, 2016; Rakhman et al., 2019; Zzahra & Hamandia, 2025). Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terintegrasi untuk memperkuat peran partai politik dalam sistem demokrasi.

Dalam konteks lokal, Kecamatan Bolaang Uki di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas sosial ekonomi. Kabupaten ini, yang terbentuk pada tahun 2008, memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar serta dinamika politik yang berkembang seiring dengan pelaksanaan pemilu serentak. Kondisi ini menjadikan Bolaang Uki sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji peran partai politik dalam pemilihan anggota DPRD tahun 2024, khususnya dalam aspek rekrutmen politik, sosialisasi politik, dan komunikasi politik. Penelitian ini juga menemukan adanya celah penelitian terkait integrasi ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka analisis yang

komprehensif, di mana sistem rekrutmen yang baik diyakini dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi dan komunikasi politik kepada masyarakat (Arfandy & Maharani, 2024).

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik masih relatif rendah, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Rizal Mahfud (2023) yang menunjukkan meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilih. Sementara itu, penelitian Situmorang et al. (2023) menekankan pentingnya strategi komunikasi politik dalam membangun kepercayaan pemilih, sedangkan penelitian Putriwani (2021) menunjukkan bahwa strategi politik yang bersifat ofensif melalui pendekatan langsung kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan perolehan suara. Meskipun memiliki kesamaan dalam pendekatan kualitatif, ketiga penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda, sehingga menunjukkan adanya ruang penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut, khususnya terkait peran partai politik dalam pemilihan serentak tahun 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran partai politik dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten tahun 2024 di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan fokus pada aspek rekrutmen politik, sosialisasi politik, dan komunikasi politik, serta faktor-faktor politik yang memengaruhinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dalam pengembangan kajian ilmu politik, serta secara praktis memberikan rekomendasi bagi partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik yang aktif dan kritis, sehingga mampu memperkuat praktik demokrasi di tingkat lokal dan nasional (Ismanu & Mar'iyah, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bolaang Uki yang terdiri atas tujuh belas desa, yaitu Tangagah, Dudepo, Pinolantungan, Salongo, Soguo, Toluaya, Molibagu, Popodu, Sondana, Tolondadu II, Tolondadu I, Tolondadu, Tabilaa, Pintadia, Salongo Timur, Salongo Barat, dan Dudepo Barat, dengan waktu penelitian sekitar dua bulan menyesuaikan kebutuhan pengumpulan data. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena peran partai politik dalam konteks pemilihan umum. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pengalaman, persepsi, dan tindakan subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi yang bersifat alamiah (Moleong dalam Husni Wahyudin et al. 2020). Analisis juga didukung perspektif fenomenologi untuk menangkap makna pengalaman para aktor yang terlibat, seperti pengawas pemilu, pengurus partai, dan masyarakat. Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dengan teknik pengumpulan data secara triangulasi, analisis bersifat induktif, serta berorientasi pada pemaknaan fenomena dibandingkan generalisasi (Sugiyono 2024).

Dalam pelaksanaannya, peneliti berperan sebagai instrumen utama sekaligus partisipan dan pengamat di lapangan. Peneliti terlibat secara langsung untuk memperoleh pemahaman kontekstual, namun tetap menjaga objektivitas dengan mengidentifikasi diri sebagai peneliti kepada informan. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Panwaslu Kecamatan, ketua partai, pengurus partai, dan masyarakat di Kecamatan Bolaang Uki, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen, literatur, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi. Observasi digunakan untuk merekam perilaku dan aktivitas subjek secara sistematis, wawancara untuk menggali informasi secara langsung dari informan, dokumentasi untuk melengkapi data tertulis dan visual, serta triangulasi untuk memastikan validitas data melalui kombinasi teknik dan sumber yang berbeda.

Analisis data dilakukan secara induktif dengan mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang berlangsung secara simultan. Data yang diperoleh dari lapangan disederhanakan dan dikelompokkan berdasarkan kategori yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif yang terstruktur agar mudah dipahami sebelum ditarik kesimpulan yang bersifat sementara dan terus diverifikasi selama proses penelitian. Keabsahan data diuji melalui kriteria kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas dengan cara memperpanjang waktu pengamatan, melakukan triangulasi, diskusi dengan rekan sejawat, serta membandingkan temuan dengan penelitian lain (Satori dan Komariah 2013). Seluruh tahapan penelitian dilakukan secara sistematis

mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis, sehingga menghasilkan temuan yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bolaang Uki dengan subjek penelitian meliputi anggota DPRD, pengurus partai politik, tokoh masyarakat, serta penyelenggara pemilu tingkat kecamatan. Fokus penelitian diarahkan pada peran partai politik dalam mempengaruhi hasil pemilihan anggota DPRD tahun 2024 melalui indikator rekrutmen politik, sosialisasi politik, dan komunikasi politik, serta efektivitas strategi kampanye yang mencakup partisipasi, pemandu kepentingan, dan kontrol politik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi awal sejak 10 Juli 2024 dan wawancara mendalam yang berlangsung hingga 29 Juli 2025.

1. Peran Partai Politik dalam Hasil Pemilihan Anggota DPRD di Kecamatan Bolaang Uki Tahun 2024

Peran partai politik dalam hasil pemilihan anggota DPRD di Kecamatan Bolaang Uki pada tahun 2024 menunjukkan posisi yang sangat strategis dalam proses interaksi antara negara dan masyarakat, khususnya dalam mewujudkan kebijakan publik. Dalam dinamika masyarakat modern, partai politik tidak lagi hanya dipandang sebagai alat perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana aktualisasi kepentingan masyarakat yang diwujudkan dalam kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik menjalankan fungsi strategis melalui pendekatan *marketing politik* yang mencakup komunikasi gagasan, pembangunan identitas dan kredibilitas, interaksi dengan komunitas, pengelolaan data kampanye, serta upaya berkelanjutan dalam memengaruhi dukungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, pengurus partai politik, dan penyelenggara pemilu tingkat kecamatan, diperoleh temuan bahwa partai politik memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi hasil pemilihan anggota DPRD. Peran tersebut tidak hanya terlihat dalam proses pencalonan, tetapi juga dalam strategi kampanye dan penggalangan dukungan. Partai politik secara aktif menggerakkan mesin partai hingga ke tingkat desa melalui kegiatan sosial, penyuluhan politik, dan pendekatan personal kepada pemilih. Selain itu, figur calon legislatif menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan partai, di mana popularitas dan rekam jejak calon sering kali lebih menentukan dibandingkan ideologi partai itu sendiri. Program kerja dan visi misi partai juga menjadi pertimbangan masyarakat, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan penggunaan pendekatan pragmatis seperti bantuan sosial dan janji politik untuk menarik simpati pemilih.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dalam konteks Pemilu 2024 di Kecamatan Bolaang Uki, partai politik memainkan peran sentral dalam menentukan calon, merancang strategi kampanye, serta membangun citra politik di tengah masyarakat. Hal ini didukung oleh semakin kompleksnya persaingan antarpartai serta meningkatnya penggunaan media, termasuk media sosial, sebagai sarana kampanye. Oleh karena itu, strategi partai politik di tingkat lokal menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan elektoral, terutama melalui penguatan struktur partai di tingkat akar rumput, efektivitas komunikasi politik, serta pemanfaatan figur calon yang memiliki kedekatan dengan masyarakat.

a. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan fungsi utama partai politik dalam menjaring dan menyeleksi calon anggota legislatif yang akan diusung dalam pemilihan DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen politik di Kecamatan Bolaang Uki pada tahun 2024 dilakukan secara selektif dan berjenjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti loyalitas kader, elektabilitas, rekam jejak sosial, serta keterwakilan wilayah. Proses ini mencerminkan bahwa partai politik tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan politik, tetapi juga sebagai institusi seleksi yang menentukan kualitas calon legislatif.

Temuan ini didukung oleh pernyataan informan, sebagaimana dikemukakan oleh Fadli Tuliabu yang menyatakan bahwa “Melakukan rekrutmen caleg dengan dasar survei elektabilitas masyarakat untuk memilih kandidat yang layak dan nomor urut calon legislatif. Sosialisasi dilakukan secara terstruktur melalui ranting dan anak ranting dengan menonjolkan kelebihan caleg tanpa saling menjatuhkan. Keberhasilan sosialisasi diukur melalui survei dan feedback dari akar rumput. Komunikasi

antar caleg dan pemilih diatur lewat rapat koordinasi dan pembentukan tim sukses tiap caleg" (wawancara 10 Juli).

Selain itu, Moh Sukri Adam mengungkapkan bahwa "Dalam proses perekrutan calon anggota DPRD di partai PDIP Kecamatan Bolaang Uki, mekanismenya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik di lapangan. Meski partai mengedepankan kader yang memiliki elektabilitas dan pengalaman, secara nyata perekrutan sering kali didominasi oleh kader yang memiliki uang karena fenomena *money politics* masih menjadi faktor utama dalam menarik dukungan masyarakat" (wawancara 11 Juli).

Hal serupa juga disampaikan oleh Halilintar P. Kadullah yang menyatakan bahwa "Partai Gerindra Kecamatan Bolaang Uki mengedepankan proses perekrutan calon yang berbasis kapabilitas dan diterima masyarakat, strategi sosialisasi yang mengangkat ideologi dan program nasional, komunikasi yang intensi dengan masyarakat, serta pengawasan kampanye yang ketat" (wawancara 15 Juli). Sementara itu, Siti Amanah Gobel menegaskan bahwa "Proses rekrutmen caleg PDIP melibatkan seleksi ketat seperti tes tertulis, wawancara, dan psikotes, dengan penilaian elektabilitas melalui survei, rekam jejak, dan hubungan dengan masyarakat" (wawancara 22 Juli).

Berdasarkan temuan tersebut, rekrutmen politik memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan kualitas calon legislatif serta representasi politik di tingkat lokal. Partai politik menjalankan fungsi seleksi secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai aspek, sehingga mampu menghasilkan calon legislatif yang representatif dan memiliki legitimasi sosial.

b. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan kesadaran, pengetahuan, dan sikap politik masyarakat yang dilakukan oleh partai politik melalui berbagai pendekatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik di Kecamatan Bolaang Uki aktif melakukan sosialisasi politik untuk memperkenalkan calon legislatif, menyampaikan visi dan misi, serta membangun citra politik di tengah masyarakat.

Sebagaimana disampaikan oleh Siti Amanah Gobel bahwa "Strategi sosialisasi yang digunakan partai meliputi kampanye tatap muka secara langsung, pemasangan alat peraga kampanye, serta pembentukan tim sukses dan relawan. Partai juga memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana sosialisasi yang efektif dengan jangkauan yang sangat luas" (wawancara 22 Juli).

Marsel Aliu juga menyatakan bahwa "Untuk sosialisasi politik, Partai Nasdem menggunakan metode sistem tandem antara caleg DPR RI, DPR provinsi, dan DPR kabupaten yang saling mendukung dalam memperkenalkan diri dan program kepada masyarakat. Selain itu, sosialisasi dilakukan melalui tim sukses di desa dengan pertemuan langsung serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi" (wawancara 10 Juli).

Selain itu, Halilintar P. Kadullah menegaskan bahwa "Strategi sosialisasi Partai Gerindra menekankan penyampaian ideologi nasionalis dan program program strategis yang dicanangkan oleh dewan pimpinan pusat, serta diukur dari antusiasme masyarakat dalam kegiatan kampanye" (wawancara 10 Juli).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi politik telah dilakukan secara aktif, pelaksanaannya masih cenderung bersifat temporer dan pragmatis, yaitu lebih intensif menjelang pemilu. Sosialisasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana pendidikan politik yang berkelanjutan, sehingga diperlukan peningkatan kualitas dan efektivitas strategi sosialisasi agar masyarakat dapat memahami pilihan politik secara rasional.

c. Komunikasi Politik

Komunikasi politik dalam penelitian ini menunjukkan peran penting partai politik sebagai penghubung antara masyarakat dan calon anggota legislatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik secara langsung maupun melalui media, untuk menyampaikan visi, program, dan janji politik sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Zulkifli Mundok bahwa "Komunikasi politik antara calon anggota DPRD dari PKS dengan pemilih dibangun melalui pendekatan langsung dan personal dengan melibatkan tokoh masyarakat dan kader partai, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik" (wawancara 22 Juli 2025).

Halilintar P. Kadullah juga menyatakan bahwa "Dalam membangun komunikasi politik dengan pemilih, anggota DPRD dari Partai Gerindra lebih banyak melakukan kerja lapangan dengan menemui masyarakat di kampung kampung, dusun, dan RT untuk menyerap aspirasi dan memperkuat hubungan" (wawancara 15 Juli 2025).

Selain itu, Marsel Aliu menegaskan bahwa "Partai Nasdem menekankan komunikasi langsung dengan masyarakat lewat turun ke lapangan, mendengarkan keluhan dan aspirasi warga untuk dijadikan bahan perjuangan legislasi setelah terpilih" (wawancara 10 Juli 2025).

Berdasarkan temuan tersebut, komunikasi politik yang dilakukan partai politik di Kecamatan Bolaang Uki berperan sebagai mekanisme strategis dalam menjembatani interaksi antara masyarakat dan calon legislatif. Komunikasi yang efektif terbukti meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap calon serta memperbesar peluang kemenangan dalam pemilihan. Oleh karena itu, komunikasi politik menjadi elemen krusial dalam menentukan keberhasilan partai politik dalam pemilihan anggota DPRD, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal.

2. Peran Faktor Politik yang Mendukung dalam Pemilihan Anggota DPRD pada Pemilu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan partai politik dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tahun 2024 di Kecamatan Bolaang Uki tidak hanya ditentukan oleh peran internal partai, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor politik pendukung yang bersifat struktural dan sosial. Faktor tersebut meliputi kekuatan jaringan cabang di tingkat sosial, kejelasan struktur kepengurusan, serta kapasitas mobilisasi pemilih yang dimiliki oleh partai politik. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan membentuk fondasi utama dalam memperkuat efektivitas partai politik dalam memperoleh dukungan masyarakat serta meningkatkan kualitas partisipasi politik di tingkat lokal.

a. Jaringan Cabang di Tingkat Sosial

Jaringan cabang di tingkat sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai hubungan sosial yang terbentuk antara individu dan kelompok dalam masyarakat yang berfungsi sebagai sarana komunikasi, pertukaran informasi, serta penguatan solidaritas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antara partai politik dan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan partisipasi politik serta memperluas basis dukungan. Jaringan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencakup relasi informal yang berkembang melalui interaksi sosial sehari hari, seperti kegiatan keagamaan, gotong royong, dan pertemuan masyarakat.

Temuan ini didukung oleh pernyataan informan, sebagaimana disampaikan oleh Zulkifli Mundok yang menyatakan bahwa "partisipasi politik bukan hanya soal memilih dalam pemilu, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat terlibat secara nyata dalam pemilihan kader maupun berdiskusi dan berinteraksi dengan calon legislatif. Dalam hal ini, upaya dari PKS adalah membangun komunikasi yang berkelanjutan serta memanfaatkan jaringan lokal seperti tokoh masyarakat dan mantan kepala desa, agar aspirasi masyarakat tersampaikan dan mereka merasa didengar dalam proses politik" (wawancara 22 Juli 2025).

Selain itu, Fadli Tuliabu mengemukakan bahwa "ada kenaikan signifikan suara PDIP di Dapil Bolaang Uki dari sekitar 24.000 ke hampir 28.000 suara, meski jumlah kursi DPRD tetap. Kenaikan ini menunjukkan partisipasi masyarakat meningkat, buah dari strategi strategi sosialisasi dan komunikasi yang diterapkan" (wawancara 8 Juli 2025). Pernyataan ini diperkuat oleh Siti Amanah Gobel yang menyatakan bahwa "partisipasi masyarakat dalam kampanye terus meningkat, dengan tingkat kehadiran yang naik dari pemilu 2020 sekitar 93,2% dan diperkirakan bertambah 2% lagi di 2024, dengan tingkat kehadiran di kampanye sekitar 70,5%" (wawancara 22 Juli 2025).

Berdasarkan temuan tersebut, jaringan cabang di tingkat sosial terbukti menjadi fondasi utama dalam memperkuat eksistensi partai politik di tingkat lokal. Jaringan sosial yang kuat memungkinkan partai membangun interaksi yang intens dan berkelanjutan dengan masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat legitimasi politik. Selain itu, jaringan sosial juga berfungsi sebagai media efektif dalam penyampaian pesan politik dan penyerapan aspirasi masyarakat, sehingga mendukung terciptanya komunikasi politik yang lebih partisipatif dan responsif.

b. Struktur Kepengurusan yang Jelas

Struktur kepengurusan yang jelas merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas organisasi partai politik dalam menjalankan fungsi dan perannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik di Kecamatan Bolaang Uki yang memiliki struktur kepengurusan yang tertata dengan baik hingga ke tingkat desa dan kelurahan mampu menjalankan kegiatan politik secara lebih sistematis, terarah, dan efisien. Kejelasan struktur ini mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga setiap unsur organisasi dapat menjalankan perannya secara optimal tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan.

Temuan ini diperkuat oleh pernyataan Moh Sukri Adam yang menyatakan bahwa "partai sangat fokus mengupayakan realisasi program yang telah dijanjikan dengan menetapkan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat yang berbeda beda di tiap daerah pemilihan. Aspirasi masyarakat diintegrasikan dalam visi dan misi caleg yang dibahas bersama partai pengusung" (wawancara 11 Juli). Selanjutnya, Zulkifli Mundok menyatakan bahwa "fungsi pemandu kepentingan sebagai peran strategis yang menggabungkan peran sebagai wakil, mediator, dan fasilitator yang aktif dalam proses politik lokal untuk memastikan kebutuhan masyarakat mendapatkan perhatian yang layak dalam kebijakan publik" (wawancara 22 Juli).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Fadli Tuliabu yang menyatakan bahwa "aspirasi masyarakat terintegrasi ke program kampanye karena adanya kesinambungan antara anggota DPRD dan kepala daerah yang berasal dari PDIP, sehingga aspirasi bisa cepat dikonversi dalam program eksekutif" (wawancara 8 Juli).

Berdasarkan hasil penelitian, struktur kepengurusan yang jelas tidak hanya berpengaruh terhadap efektivitas internal partai, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Partai yang memiliki struktur organisasi yang tertata cenderung dinilai lebih profesional, disiplin, dan bertanggung jawab, sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. Selain itu, struktur kepengurusan yang jelas juga berperan dalam menjaga stabilitas internal partai, memperkuat koordinasi antarlevel organisasi, serta mendukung proses kaderisasi politik yang berkelanjutan.

c. Kapasitas Mobilisasi Pemilih

Kapasitas mobilisasi pemilih dalam penelitian ini menunjukkan kemampuan partai politik dalam menggerakkan, memengaruhi, dan mengarahkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas mobilisasi pemilih sangat dipengaruhi oleh kemampuan partai dalam memanfaatkan sumber daya politik dan sosial, seperti jaringan organisasi, tokoh masyarakat, media komunikasi, serta keterlibatan kader dan relawan di lapangan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Fadli Tuliabu bahwa "dalam hal kontrol politik selama kampanye, PDI Perjuangan menerapkan sistem pelaporan yang terstruktur. Setiap caleg wajib melaporkan kegiatan sosialisasi dan pendataan dukungan dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi dari pusat hingga cabang partai" (wawancara 8 Juli). Hal ini diperkuat oleh Moh Sukri Adam yang menyatakan bahwa "keberhasilan kontrol politik diukur melalui data dan evaluasi intensif dari hasil pemantauan lapangan oleh tim pengawas yang selalu turun ke lokasi kampanye untuk mendeteksi kendala dan ketidaksesuaian" (wawancara 11 Juli).

Selanjutnya, Zulkifli Mundok menegaskan bahwa "fungsi kontrol politik harus diwujudkan melalui hubungan yang harmonis antara anggota DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, agar pengawasan dapat berjalan efektif dan menghasilkan kebijakan yang benar benar berpihak pada kepentingan rakyat" (wawancara 22 Juli).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik yang memiliki kapasitas mobilisasi tinggi umumnya memiliki jaringan sosial yang luas, struktur kepengurusan yang aktif, serta strategi komunikasi politik yang terencana dengan baik. Mobilisasi pemilih dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan melalui kegiatan sosialisasi, kaderisasi, serta kampanye yang melibatkan masyarakat secara langsung. Selain itu, pendekatan sosial dan kultural yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat terbukti lebih efektif dalam membangun kedekatan emosional dan meningkatkan loyalitas pemilih.

Secara keseluruhan, kapasitas mobilisasi pemilih menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan partai politik dalam pemilihan anggota DPRD di Kecamatan Bolaang Uki. Partai yang mampu mengintegrasikan kekuatan organisasi, strategi komunikasi, serta jaringan sosial secara efektif tidak hanya berhasil meningkatkan partisipasi politik masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat posisi politiknya dalam sistem demokrasi lokal.

Pembahasan

1. Peran Partai Politik dalam Hasil Pemilihan Anggota DPRD di Kecamatan Bolaang Uki Tahun 2024

Peran partai politik dalam mempengaruhi hasil pemilihan anggota DPRD di Kecamatan Bolaang Uki pada tahun 2024 menunjukkan bahwa partai tidak hanya berfungsi sebagai pengusung kandidat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam membentuk preferensi politik masyarakat melalui berbagai fungsi dan strategi yang dijalankan selama proses politik berlangsung. Dalam konteks demokrasi perwakilan, partai politik berperan sebagai agen mobilisasi suara yang bekerja melalui mekanisme sosialisasi politik, rekrutmen kader, serta konsolidasi jaringan kekuatan di tingkat lokal. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan yang terstruktur seperti kampanye terbuka, diskusi publik, penyebaran materi sosialisasi, serta pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan informasi kepada pemilih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam transisi dari tahap pencalonan hingga kampanye, partai politik secara strategis memanfaatkan modal sosial dan hubungan personal kandidat dengan konstituen. Partai mengarahkan sumber daya dan dukungan logistik kepada kandidat yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi, sekaligus tetap mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal guna menjaga kepercayaan publik. Strategi ini tidak hanya bersifat vertikal dari elit partai, tetapi juga memanfaatkan relasi horizontal melalui tokoh masyarakat, pemuka agama, serta jaringan keluarga yang memiliki pengaruh kuat dalam membentuk keputusan memilih. Selain itu, dinamika politik lokal memperlihatkan adanya keterkaitan antara identitas sosial budaya masyarakat dengan afiliasi politik yang diusung partai, sehingga pendekatan kultural menjadi instrumen penting dalam memperkuat legitimasi kandidat. Dengan demikian, partai politik berperan aktif dalam membentuk persepsi publik melalui narasi politik yang sesuai dengan konteks lokal, yang pada akhirnya menentukan peta kekuatan politik di daerah tersebut.

a. Peran Partai Politik sebagai Rekrutmen Politik

Dalam perspektif teoritis, *political recruitment* sebagaimana dikemukakan oleh Gabriel A. Almond dalam *The Politics of the Developing Areas* menempatkan partai politik sebagai mekanisme utama dalam proses seleksi dan penyiapan individu untuk menduduki jabatan politik. Rekrutmen politik tidak hanya berkaitan dengan pemilihan calon, tetapi juga mencakup proses kaderisasi, pelatihan, serta internalisasi nilai politik guna menjaga stabilitas sistem. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen calon anggota DPRD di Kecamatan Bolaang Uki pada tahun 2024 dilaksanakan secara selektif, berjenjang, dan berorientasi pada kualitas, dengan mempertimbangkan loyalitas kader, rekam jejak sosial, serta kedekatan dengan masyarakat pemilih.

Proses rekrutmen juga menunjukkan adanya pendekatan partisipatif yang melibatkan struktur organisasi partai dari tingkat bawah hingga atas, serta membuka ruang bagi aspirasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pencalonan tidak semata bergantung pada kepentingan elit, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan akar rumput. Dalam aspek representasi, partai memperhatikan penyebaran wilayah asal calon legislatif agar setiap daerah dalam kecamatan dapat terwakili secara proporsional. Dengan demikian, rekrutmen tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam menghasilkan calon legislatif yang memiliki kapabilitas, legitimasi sosial, serta kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian empiris yang diungkapkan oleh Waqos et al. (2022) yang menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia menjalankan mekanisme rekrutmen secara berjenjang dan sistematis melalui proses penjaringan, penyaringan, seleksi, hingga penetapan calon guna memastikan kualitas kandidat legislatif. Selain itu, penelitian Simanjuntak (2019) menegaskan bahwa keberhasilan kaderisasi partai berpengaruh terhadap kesiapan calon legislatif dalam menghadapi kontestasi politik. Dengan demikian, baik secara teoritis maupun empiris, fungsi rekrutmen partai politik

di Kecamatan Bolaang Uki telah berjalan sesuai dengan kerangka struktural fungsional Almond sebagai mekanisme penting dalam menjaga keberlangsungan sistem politik.

b. Peran Partai Politik sebagai Sosialisasi Politik

Dalam kerangka *political socialization*, Gabriel A. Almond dalam *The Politics of the Developing Areas* menjelaskan bahwa partai politik memiliki peran penting sebagai agen sosialisasi politik yang bertugas membentuk sikap, nilai, dan orientasi masyarakat terhadap sistem politik. Sosialisasi politik dilakukan melalui kegiatan kaderisasi, kampanye, serta pendidikan politik yang berkelanjutan guna membangun budaya politik yang stabil dan partisipatif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik di Kecamatan Bolaang Uki bertujuan untuk memperkenalkan calon legislatif, menyampaikan visi dan misi partai, serta membangun citra dan loyalitas politik masyarakat. Proses ini dilakukan melalui berbagai metode seperti pertemuan langsung, pemasangan atribut kampanye, pemanfaatan media sosial, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Namun demikian, pelaksanaan sosialisasi cenderung bersifat temporer dan pragmatis, karena lebih aktif dilakukan menjelang pemilu dan belum sepenuhnya diarahkan pada pendidikan politik yang berkelanjutan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara konseptual terdapat keselarasan dengan teori Almond, tetapi secara empiris implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan idealitas fungsi sosialisasi politik. Temuan ini juga sejalan dengan kajian Waqos et al. (2022) yang menunjukkan bahwa sosialisasi politik partai di Indonesia masih cenderung berorientasi pada momentum elektoral. Selain itu, kajian Said et al. (2026) menegaskan bahwa efektivitas sosialisasi sangat bergantung pada intensitas dan konsistensi pelaksanaannya. Dengan demikian, meskipun fungsi sosialisasi telah dijalankan, diperlukan penguatan strategi agar partai politik tidak hanya berperan sebagai mesin elektoral, tetapi juga sebagai agen pendidikan politik yang mampu meningkatkan kesadaran dan kualitas demokrasi masyarakat.

c. Peran Partai Politik sebagai Komunikasi Politik

Dalam perspektif *political communication*, Gabriel A. Almond menempatkan partai politik sebagai sarana komunikasi yang menjembatani hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Partai berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat kepada penguasa serta menyampaikan kebijakan dan program politik kepada publik, sehingga tercipta komunikasi dua arah yang menjaga stabilitas sistem politik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik di Kecamatan Bolaang Uki berfungsi sebagai mekanisme strategis dalam memfasilitasi interaksi antara calon legislatif dan masyarakat. Partai berperan sebagai agen yang menyampaikan program, visi, dan janji politik kepada masyarakat sekaligus menyerap aspirasi, kebutuhan, dan masukan dari masyarakat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan strategi kampanye. Proses komunikasi ini dilakukan melalui berbagai saluran seperti pertemuan langsung, media sosial, serta keterlibatan dalam kegiatan masyarakat.

Secara konseptual, temuan ini menunjukkan keselarasan dengan teori Almond, namun secara empiris masih terdapat keterbatasan karena komunikasi politik cenderung lebih berfokus pada kepentingan kampanye dan belum sepenuhnya dilakukan secara berkelanjutan sebagai sarana penyerapan aspirasi masyarakat. Temuan ini juga diperkuat oleh kajian Waqos et al. (2022) yang menyatakan bahwa komunikasi politik partai berperan penting dalam membangun citra dan hubungan dengan konstituen, serta penelitian Aminulloh (2010) yang menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi politik sangat dipengaruhi oleh kesiapan kader dan struktur organisasi partai.

Dengan demikian, fungsi komunikasi politik partai di Kecamatan Bolaang Uki telah berjalan sebagai mekanisme penting dalam menghubungkan masyarakat dengan sistem politik, namun masih diperlukan penguatan agar komunikasi tersebut lebih substantif, partisipatif, dan berkelanjutan. Hal ini penting agar partai politik tidak hanya menjadi sarana kampanye, tetapi juga sebagai mediator yang mampu memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga politik secara lebih mendalam.

2. Peran Faktor Politik yang Mendukung dalam Pemilihan Anggota DPRD pada Pemilu

Efektivitas strategi kampanye merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan partai politik dalam memperoleh dukungan publik pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten, khususnya dalam konteks Pemilu 2024 di Kecamatan Bolaang Uki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik mengombinasikan berbagai strategi kampanye yang bersifat konvensional dan modern untuk menjangkau serta memengaruhi preferensi politik masyarakat. Strategi tersebut meliputi kampanye tatap muka secara langsung melalui pendekatan *door to door*, pemanfaatan media sosial, pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, serta penguatan jaringan kader hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Secara akademik, efektivitas strategi kampanye dapat diukur melalui tiga aspek utama, yaitu tingkat jangkauan, tingkat kesesuaian pesan dengan kebutuhan masyarakat, serta kemampuan strategi dalam mengonversi preferensi politik menjadi suara pada hari pemungutan suara.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kampanye tatap muka tetap menjadi strategi yang paling efektif dalam konteks sosial masyarakat Kecamatan Bolaang Uki. Pola komunikasi langsung memungkinkan terjadinya interaksi personal antara calon legislatif dengan pemilih sehingga mampu membangun kedekatan emosional dan kepercayaan. Pendekatan berbasis relasi sosial melalui kunjungan rumah, kehadiran dalam kegiatan keagamaan, serta keterlibatan dalam aktivitas adat terbukti memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Hal ini sejalan dengan pendekatan komunikasi politik berbasis interaksi interpersonal yang menekankan bahwa pesan politik lebih mudah diterima apabila disampaikan melalui hubungan sosial yang telah terbangun sebelumnya. Di sisi lain, pemanfaatan media sosial juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terutama di kalangan pemilih muda, meskipun penggunaannya masih terbatas sebagai pelengkap karena kendala literasi digital dan akses internet di beberapa wilayah. Selain itu, kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial, gotong royong, dan kegiatan olahraga turut memperkuat citra partai sekaligus membangun ikatan emosional dengan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan strategi kampanye sangat ditentukan oleh kemampuan partai dalam mengintegrasikan pendekatan tradisional dan modern serta menyesuaikan pesan politik dengan konteks sosial budaya masyarakat setempat.

a. Jaringan Cabang Tingkat Sosial

   Dalam perspektif teoritis, Maurice Duverger dalam *Political Parties* menegaskan bahwa jaringan cabang di tingkat sosial merupakan elemen penting yang menentukan kekuatan organisasi partai politik. Jaringan ini memungkinkan partai untuk menjalin hubungan langsung dengan masyarakat, memperluas basis dukungan, serta menjalankan fungsi mobilisasi politik secara efektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jaringan cabang di tingkat sosial menjadi elemen paling fundamental dalam mendukung keberhasilan partai politik pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tahun 2024 di Kecamatan Bolaang Uki. Jaringan sosial yang kuat memungkinkan partai tidak hanya berperan sebagai peserta pemilu, tetapi juga sebagai agen sosial yang mampu membangun solidaritas, partisipasi, dan kesadaran politik masyarakat.

   Keberhasilan partai dalam menjaga keaktifan jaringan sosialnya berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat serta tingkat kepercayaan terhadap partai. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan sosial bukan sekadar struktur organisasi, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara partai dan masyarakat dalam membangun hubungan yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Paskarina et al. (2012) yang menegaskan bahwa kekuatan organisasi partai di tingkat akar rumput sangat mempengaruhi hubungan antara partai dan konstituen. Selain itu, kajian Andrian (2022) menunjukkan bahwa jaringan organisasi partai dari pusat hingga daerah menjadi tulang punggung dalam proses kampanye dan mobilisasi dukungan politik. Dengan demikian, baik secara teoritis maupun empiris, jaringan cabang di tingkat sosial merupakan faktor strategis dalam memperkuat fungsi partai politik serta mendukung keberlangsungan demokrasi lokal.

b. Struktur Kepentingan yang Jelas

   Menurut Maurice Duverger dalam *Political Parties*, partai politik yang kuat ditandai oleh adanya struktur kepentingan yang jelas, yang mencerminkan kemampuan partai dalam merumuskan tujuan politik serta merepresentasikan aspirasi masyarakat secara konsisten. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kejelasan struktur kepengurusan partai politik di Kecamatan Bolaang Uki berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Partai yang memiliki struktur

organisasi yang tertata dinilai lebih profesional, disiplin, dan bertanggung jawab, sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik.

Kejelasan struktur kepengurusan juga berimplikasi pada efektivitas internal partai dalam menjalankan fungsi representasi dan mobilisasi politik. Struktur organisasi yang sistematis memungkinkan pembagian tugas yang jelas, mengurangi potensi konflik internal, serta memastikan bahwa strategi politik dapat dijalankan secara konsisten di seluruh tingkatan organisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Aji (2024) yang menyatakan bahwa kelembagaan partai yang tertata mampu meningkatkan kepercayaan publik, serta kajian Hadi (2010) yang menunjukkan bahwa struktur organisasi yang jelas berperan penting dalam menjaga stabilitas internal dan efektivitas mobilisasi politik. Dengan demikian, kejelasan struktur kepentingan dan kepengurusan partai menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan partai sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

c. Kapasitas Mobilisasi Pemilih

Dalam kerangka teoritis Maurice Duverger dalam *Political Parties*, kapasitas mobilisasi pemilih merupakan indikator utama kekuatan partai politik dalam menggerakkan dan mengorganisasi dukungan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kapasitas mobilisasi pemilih di Kecamatan Bolaang Uki sangat dipengaruhi oleh kemampuan partai dalam memanfaatkan sumber daya politik dan sosial yang dimiliki, seperti dukungan finansial, jaringan tokoh masyarakat, akses media komunikasi, serta keterlibatan kader dan relawan di tingkat lokal. Partai yang mampu mengoptimalkan sumber daya tersebut menunjukkan kinerja mobilisasi yang lebih efektif dalam memengaruhi preferensi politik masyarakat.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa mobilisasi pemilih dilakukan melalui pembentukan tim sukses, penggerakan struktur partai hingga tingkat ranting, serta pelaksanaan kampanye langsung melalui pertemuan tatap muka dan penggunaan media sosial. Strategi yang melibatkan figur lokal yang berpengaruh terbukti lebih efektif dalam menarik dukungan masyarakat dibandingkan pendekatan formal semata. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amanah dan Dewi (2023) yang menegaskan bahwa komunikasi politik yang intensif berpengaruh terhadap perilaku pemilih dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Dengan demikian, kapasitas mobilisasi pemilih menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan partai politik dalam pemilihan anggota DPRD di Kecamatan Bolaang Uki. Kemampuan partai dalam mengintegrasikan jaringan sosial, strategi komunikasi, serta pemanfaatan sumber daya politik tidak hanya meningkatkan perolehan suara, tetapi juga memperkuat posisi partai sebagai institusi demokrasi yang mampu menggerakkan partisipasi politik masyarakat secara luas dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran partai politik dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten tahun 2024 di Kecamatan Bolaang Uki menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan kerangka teoritis yang dikemukakan oleh *Gabriel A. Almond* dan *Maurice Duverger*. Secara teoritis, Almond menekankan fungsi partai politik melalui mekanisme *political recruitment*, *political socialization*, dan komunikasi politik, sedangkan Duverger menyoroti pentingnya aspek organisasi partai seperti jaringan cabang di tingkat sosial, kejelasan struktur kepentingan, serta kapasitas mobilisasi pemilih. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partai politik di tingkat lokal telah menjalankan sebagian besar fungsi tersebut, yang tercermin melalui proses rekrutmen calon legislatif yang selektif dan berjenjang, pelaksanaan komunikasi politik yang menjembatani hubungan antara masyarakat dan kandidat, serta penguatan jaringan organisasi hingga ke tingkat akar rumput yang berperan dalam membangun solidaritas dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Selain itu, kapasitas mobilisasi pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan tokoh lokal, sumber daya politik, dan strategi kampanye yang terintegrasi juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan partai dalam kontestasi elektoral.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa beberapa fungsi partai politik belum sepenuhnya berjalan secara optimal, khususnya dalam aspek *political socialization* yang masih cenderung bersifat temporer dan berorientasi pada momentum pemilu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa partai politik

masih lebih dominan berperan sebagai mesin elektoral dibandingkan sebagai agen pendidikan politik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun secara umum terdapat keselarasan antara teori dan praktik politik di tingkat lokal, masih diperlukan penguatan pada aspek sosialisasi politik, komunikasi yang lebih substantif, serta peningkatan kualitas kelembagaan partai agar mampu menjalankan fungsi secara lebih konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan peran partai politik tidak hanya penting dalam konteks perolehan suara, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas demokrasi yang lebih partisipatif, representatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Aba, A., Suryadi, K., & Matang, M. (2023). Pendidikan Politik di Partai Politik yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal pada Pilkada. *PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran*, *8*(2), 9–20. https://doi.org/10.29407/pn.v8i2.19593

Aji, W. T. (2024). Politik Lokal: Tinjauan Systematic Literature Review. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, *2*(1), 415–429. https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1805

Al-Khansa, B. B., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Masyarakat Demokrasi Yang Berkeadaban Dari Saat Ini. *Jurnal Kewarganegaraan*, *5*(1), 249–258. https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1429

Amanah, N., & Dewi, N. R. (2023). Pengaruh Sosialisasi Politik Partai Islam Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2019 di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, *5*(1), 58–72. https://doi.org/10.21580/jpw.v5i1.17929

Aminuddin, M. F. (2016). *Electoral System and Party Dimension Assessment in Democratic Indonesia*. 1–15.

Aminulloh, A. (2010). Komunikasi Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu legislatif 2009. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *8*(1), 26–35.

Andrian, A. (2022). Komunikasi Politik Partai Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Rakyat Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *7*(9), 15417--15429. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14332

Arfandy, M. F., & Maharani, A. R. (2024). Penguatan Peran Partai Politik Di Indonesia Melalui Perbaikan Kaderisasi Dan Sistem Partai Politik. *Majalah Hukum Nasional*, *54*(1), 83–102.

Duverger, M. (1954). *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*.

Hadi, K. (2010). Satu Dasawarsa Relasi Politik Lokal Dan Nasional Dalam Konteks Otonomi Daerah. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, *1*(2), 5–18.

Hasibuan, S. A. (2023). Sistem Pemilihan Umum dalam Kaitan dengan Negara Demokrasi. *Warta Dharmawangsa*, *17*(2), 602–609. https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3174

Ismanu, M. N., & Mar'iyah, C. (2021). Faktor-Faktor Internal Kemenangan Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Depok Tahun 2019. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, *3*(1), 34–59. https://doi.org/10.15575/politicon.v3i1.9507

Labolo, M., & Ilham, T. (2015). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Innonesia. *Occupational Health*, *51*(5), 23–25.

Lutpiani, E. (2021). Implementasi Demokrasi di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1–13.

Paskarina, C., Yuningsih, N. Y., & Witianti, S. (2012). Relationship of political parties and constituents in kota bandung and kabupaten sumedang. *Sosiohumaniora*, *14*(3), 262–272.

Putriwani, B. (2021). Strategi politik incumbent dan faktor penyebab kekalahan pada pemilihan legislatif 2019 Kabupaten Bangka. *Jurnal Sosial Teknologi*, *1*(2), 117–122.

Rahmat, D., Fathanudien, A., Adhiyaksa, G., & Tendiyanto, T. (2021). *Law Enforcement of Election Crimes in Indonesia*. *08*, 210–216.

Rakhman, M. A., Muhammad, H. A., Ilmu, F., Politik, I., & Jambi, U. (2019). *Analisis Pengelolaan Dana Partai Terhadap Masa Depan Partai Politik : Sebuah Kajian Penguatan " PARTY-ID " Terhadap Partai Politik Baru 2019*. *1*(2), 155–166.

Said, S., Akta, D., & Eldo, P. (2026). Analisis Model Pendidikan Politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kaum Muda di Kabupaten Wonosobo. *ALADALAH: Jurnal*

Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, *4*(1), 293–300.

Saleh, Z. A. (2008). *D emokrasi d an partai politik*. *5*(1), 56–80.

Simanjuntak, N. Y. (2019). Rekrutmen partai politik dalam pencalonan Pemilu anggota DPRD Kabupaten Simalungun tahun 2019. *Jurnal Politik Indonesia*, *8*(2), 92–109. https://doi.org/10.20473/jpi.v8i2.39938

Siregar, I., Lubis, S., & Zamharir, H. (1998). *Democratic Liberal Theory Based on Literature Review*. 34–45.

Situmorang, M., Silviani, I., & Ginting, E. A. (2023). Strategi komunikasi partai politik PDIP Sumut dalam membangun kepercayaan pemilih pada pemilihan umum legislatif tahun 2024. *Jurnal Social Opinion: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, *7*(2), 134–145.

Susanto, E. H. (2013). Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Kajian Komunikasi*, *1*(2), 163. https://doi.org/10.24198/jkk.v1i2.6041

Wahdini, M. (2024). *The Effectiveness of Simultaneous Election 2019 Evaluation Through the Simultaneous Election 2024*. *14*(2022), 123–134.

Waqos, A., Huda, D. N. K., Purnomo, M., & others. (2022). Sistem Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Menentukan Calon Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 55–67.

Widjiastuti, A., Program, L. S., Pelita, U., Surabaya, H., & Indonesia, J. A. S.-. (2016). *Peoples ' Sovereignty Principle on the Implementation of General Election in Indonesia*. *6*(4), 36–45.

Zzahra, N., & Hamandia, M. R. (2025). Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial BISNIS DIGITAL (E-BUSINESS). *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, *11*(3).